

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh. Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSPP) Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2004 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan Daerahnya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri merupakan pedoman perencanaan pembangunan daerah yang memiliki jangkauan upaya pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. RPJPD merupakan dokumen penting yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala yang lebih rendah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Strategis –Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 pada dasarnya merupakan implementasi atas visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJP Daerah, khususnya dengan Tahap III Pelaksanaan RPJPD tahun 2015–2019 dengan visi sebagai berikut “WONOGIRI YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING” .

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah jangka panjang diatas ditempuh melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global.
- c. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah.
- e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 juga mengacu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu Visi RPJMN Tahun 2015 – 2019 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG .

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Prioritas pokok: 1) Kedaulatan Pangan, 2) Kemandirian Energi, 3) Kemaritiman dan 4) Pembangunan Pariwisata dan Industri. Selain visi dan prioritas pokok juga mengacu pada NAWA CITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BKBKSP Kabupaten Wonogiri juga mengacu Visi pembangunan Jawa Tengah dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari (Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi), dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”.
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan menjabarkan RPJMD 2016-2021 kedalam Rencana Strategis 2016-2021 yang memuat Visi Misi BKBKSP dalam mendukung Program Pembangunan Bupati terpilih dengan

berlandaskan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Institusi di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

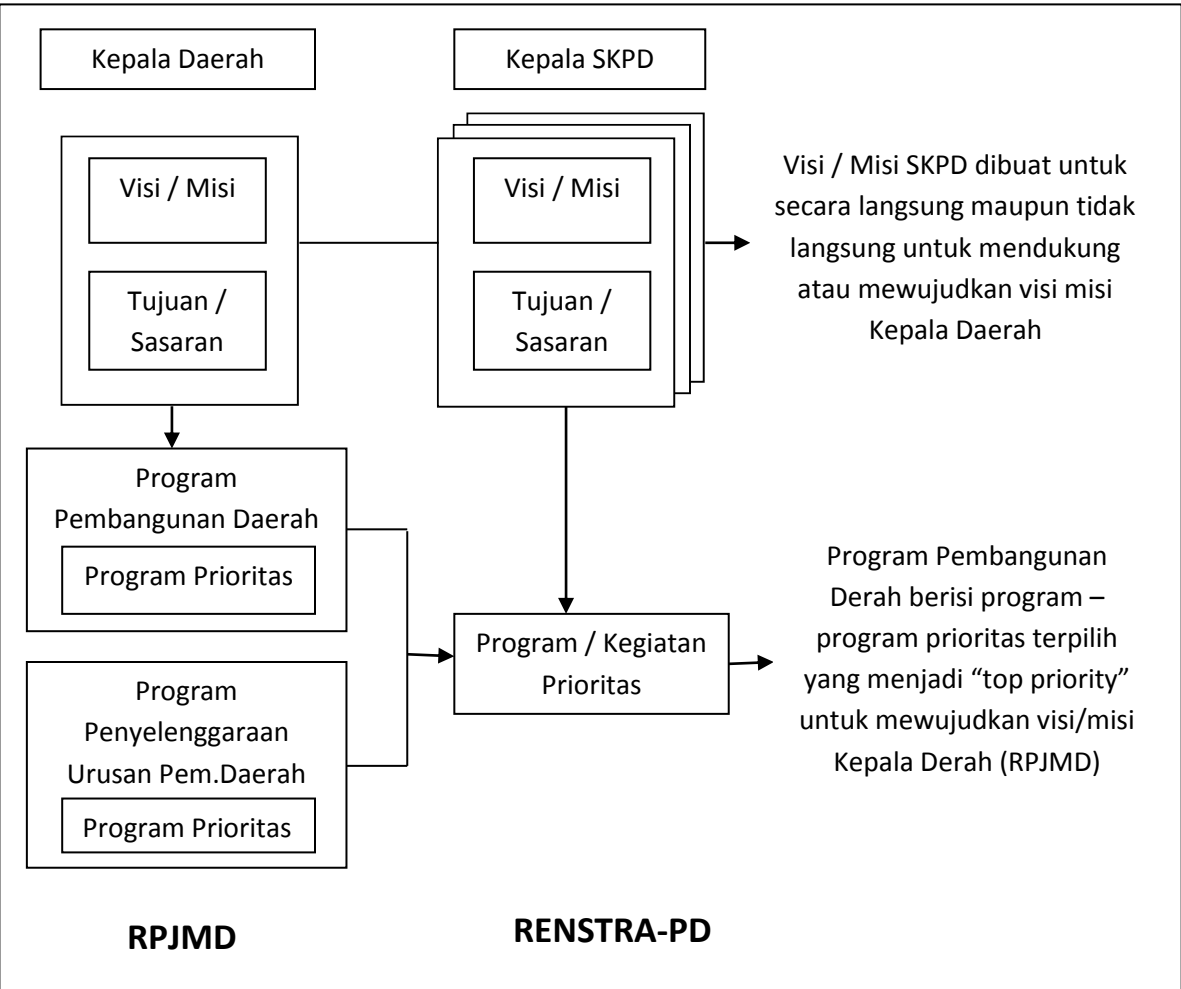
Rencana Strategis BKBKSPP Kabupaten Wonogiri ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra)-Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra BKBKSPP Kabupaten Wonogiri memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah BKBKSPP Kabupaten Wonogiri serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya Kepala BKBKSPP menyiapkan rencana kegiatan, Rencana Kerja BKBKSPP, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra BKBKSPP, Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra-PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah. Rencana strategis adalah bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama kurun waktu 2016-2021 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

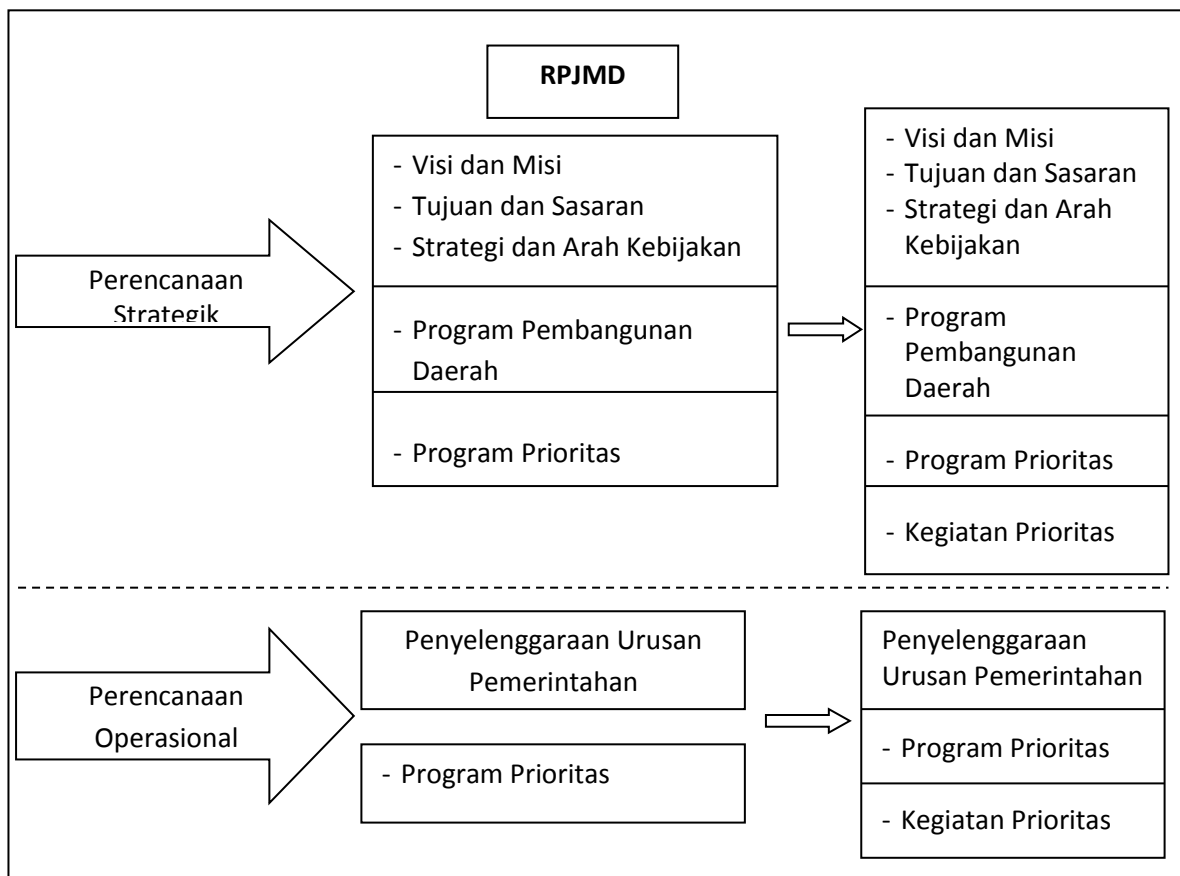
Penyusunan Renstra BKBKSPP ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus

berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Bupati dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala SKPD dijabarkan dalam Renstra-PD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.1. dan Gambar 1.2. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra -PD.



Gambar 1.1. : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra-PD



Gambar 1.2. : Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra-PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah meliputi :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118);

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan Renstra -PD adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3. 1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini antara lain adalah:

1. Menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan, yang diuraikan sebagai turunan dari dokumen RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021;
2. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.3. 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra ini yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 5 tahun (2016-2021) menjadi visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Merupakan target kualitatif organisasi yang terukur, transparan dan akuntabel, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi (penganggaran berbasis kinerja);
3. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik laporan realisasi anggaran, tahunan, LKjIP, dan masukan bagi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BKBKSPP Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat hal-hal sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra -PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra-PD, keterkaitan Renstra-PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja -PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan-PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran -PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra -PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra -PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, memuat hal-hal sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra -PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan /atau Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja yang dituangkan dalam Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan -PD Kabupaten dan Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan -PD Kabupaten.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra -PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra -PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan-PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisikan hal-hal tentang :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Padabagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra-PD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra -PD provinsi/kabupaten/kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra -PD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Perangkat Daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah sebagaimana dihasilkan pada tabel Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah dan tabel Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel Rumusan Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

4.3 Strategi dan Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tabel rumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari tabel Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel Rumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri pada saat ini adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta disamping diberi tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja. Tugas Pokok Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri yaitu : “ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan Perempuan”, dan berperan aktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri terutama penekanan pertambahan jumlah kelahiran, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan serta pemenuhan kebutuhan pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah, dengan program kegiatan Penyediaan pelayanan KB, peningkatan ketahanan keluarga, perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta pemberdayaan perempuan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja. Tugas Pokok Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri, bahwa Tugas Pokok Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri yaitu : “ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan Perempuan”,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan lingkup kabupaten;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

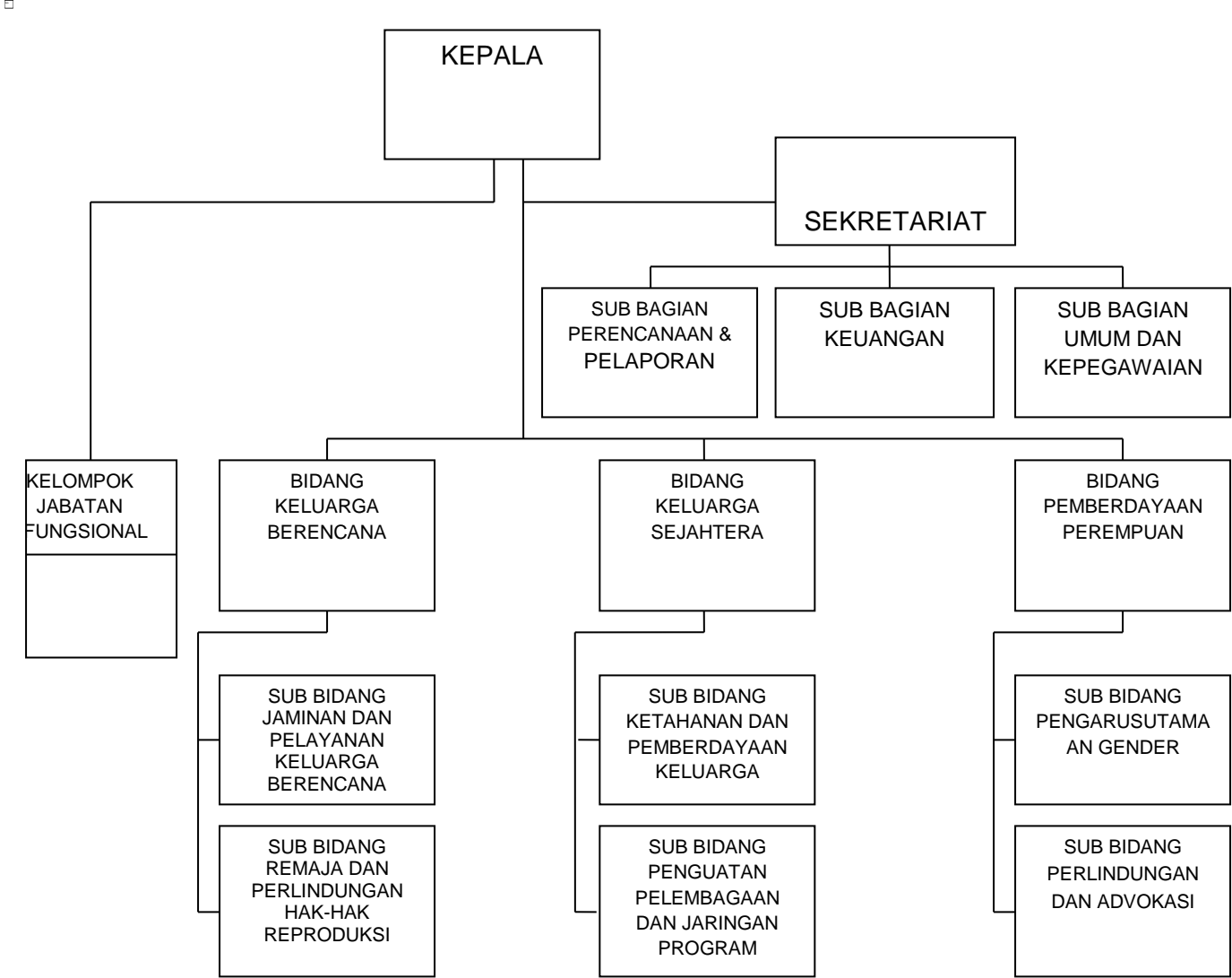
2.2 SUMBER DAYA SKPD

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, susunan organisasi pada Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

1. Kepala membawahi ;
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Keluarga Berencana;
 - c. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - a. Subbidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. Subbidang Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
4. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - a. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Subbidang Penguatan Pelembagaan dan Jaringan Program;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - a. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. Subbidang Perlindungan dan Advokasi;

Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :



Gambar 2.1. : Gambar Bagan Organisasi SKPD

B. Sumber Daya Manusia.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri sangat diperlukan adanya Sumber daya manusia selain tidak kalah pentingnya adalah asset yang berupa Peralatan dan Perlengkapan.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 72 orang terdiri dari PNS Laki-laki 42 orang dan PNS Perempuan 30 orang dengan jabatan yaitu Eselon II B sebanyak 1 orang, Eselon III A sebanyak 1 orang, Eselon III B sebanyak 3 orang, Eselon IV A sebanyak 9 orang, serta staf sebanyak 58 orang. Dari 58 orang staf, terdiri dari Penyuluh KB sebanyak 46 orang, sebanyak 12 orang menjadi Fungsional Umum dan Pegawai Non PNS (kontrak) sebanyak 59 orang.

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk pasca sarjana (S2) sebanyak 9 orang, Sarjana (S1) sebanyak 29 orang, DIII sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 29 orang, SLTP sebanyak 0 orang dan SD sebanyak 1 orang. Secara lengkap dapat dilihat per golongan/ruang per pendidikan terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
S-2	2	7
S-1	15	14
D III	2	2
SLTP	0	0
SLTA	22	7
SD	1	0
JUMLAH	42	30

Tabel 2.2
Jumlah PNS dan Kontrak sesuai Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

NO	GOLONGAN / RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN												Jumlah
		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
1.	IV / e	-		-		-		-		-		-		-
2.	IV / d	-		-		-		-		-		-		-
3.	IV / c	-	1	-		-		-		-		-		1
4.	IV / b	-	2	3		-		-		-		-		5
5.	IV / a	2	3	6	4	-		-		-		-		15
	Jumlah Gol IV	2	6	9	4	-		-		-		-		21

6.	III / d	-	1	2	4	1	1	8	7	-	-	-	24
7.	III / c	-		2	2	1	1	6		-	-	-	12
8.	III / b	-		2	4	-		5		-	-	-	11
9.	III / a	-		-		-		-		-	-	-	-
	Jumlah Gol III	-	1	6	10	2	2	19	7	-	-	-	47
10.	II / d	-		-		-		-		-	-	-	-
11.	II / c	-		-		-		-		-	-	-	
12.	II / b	-		-		-		3		-	-	-	3
13.	II / a	-		-		-		-		-	1	-	1
	Jumlah Gol II	-		-		-		3		-	1	-	4
14.	I / d	-		-		-		-		-	-	-	-
15.	I / c	-		-		-		-		-	-	-	-
16.	I / b	-		-		-		-		-	-	-	-
17.	I / a	-		-		-		-		-	-	-	-
	Jumlah Gol I												
18.	PP 31	-		-		-		-		-	-	-	
19.	Kontrak	-		4	9	2	9	16	16	3	-	-	59
	TOTAL	2	7	19	23	4	11	38	23	3	1		131

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri apabila dilihat dari tingkat pendidikan merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan Program Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Program Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.3
Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2011- 2015

TAHUN	PEGAWAI	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN												JML
		L	P	SD		SMP		SMA		DIII		S1		S2		
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2011	KONTRAK	5		0		0		5		0		0		0		5
	PNS KANTOR	16	15	1		0		8		3		13		6		31
	PLKB	38	25	0		0		40		4		11		8		63
JUMLAH		59	40	1		0		53		7		24		14		99
2012	KONTRAK	9		0		0		9		0		0		0		9
	PNS KANTOR	15	13	1		0		9		3		9		6		28
	PLKB	34	23	0		0		27		4		24		2		57
JUMLAH		58	36	1		0		45		7		33		8		94
2013	KONTRAK	10	4	0		2		6		3		3		0		14
	PNS KANTOR	15	11	1		0		8		2		7		8		26
	PLKB	29	19	0		0		22		2		23		1		48
JUMLAH		54	34	1		2		36		7		33		9		88

2014	KONTRAK	20	15	0		2		16		8		9		0		35
	PNS KANTOR	15	11	1		0		8		2		7		8		26
	PLKB	28	19	0		0		22		2		22		1		47
JUMLAH		63	45	1		2		46		12		38		9		108
2015	KONTRAK	26	33	0		3		14	16	2	7	7	10			59
	PNS KANTOR	15	11	1		0		8		1	1	3	4	2	6	26
	PLKB	27	19	0		0		14	7	1	1	12	10	1		46
JUMLAH		68	63	1		3		36	23	4	9	22	24	3	6	131

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri apabila dilihat dari tingkat pendidikan merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri.

C. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja sebagai salah satu daya dukung ketatalaksanaan perencanaan pembangunan daerah, di Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya mengupayakan peningkatannya, sesuai data pada Tahun 2016 Sarana dan prasarana kerja di Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut :

- Tanah perkantoran seluas 600 m² yang di atasnya dibangun gedung kantor bertingkat dua dengan luas lantai 404,50 m² yang terdiri dari Ruang Kerja Pimpinan, Ruang Kerja Bidang serta Ruang Kerja Sekretariat sebanyak 5 ruang, Ruang Pertemuan sebanyak 1 ruang, Mushola dan garasi.
- Tanah Gudang seluas 500 m² yang di atasnya dibangun gedung gudang. Tanah Balai Penyuluh KB sejumlah 24 kecamatan status Hak pakai, 1 Kec. Wonogiri tanah seluas 964 m² yang dibangun Balai Penyuluh KB seluas 50 m².
- Kendaraan roda empat sebanyak 7 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 108 unit.
- Komputer sebanyak 9 unit , printer sebanyak 37 unit, Laptop sebanyak 31 unit, Mesin ketik sebanyak 37 buah dan PPA/ Wirelles sebanyak 71 buah.
- LCD sebanyak 6 unit, OHP dan Layarnya masing-masing 1 unit.
- Telepon parallel 1 unit.
- Peralatan lainnya berupa meja, kursi, white board, AC, Kipas Angin dan lain-lainnya sebagai pendukung pelaksanaan kerja.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pelayanan Perangkat Daerah yang telah diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri kinerjanya dapat dilihat dari beberapa pencapaian selama ini sebagai berikut :

1. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru.

a. Peserta KB Baru Pria.

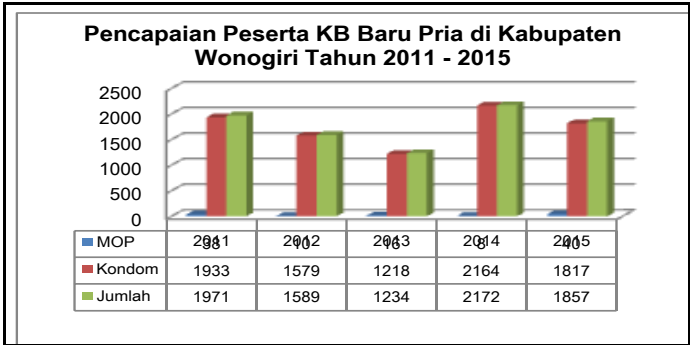
Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan yang dikembangkan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri dapat diketahui partisipasi pria menjadi peserta KB baru dapat disampaikan tabel berikut :

Tabel 2.4
Partisipasi Pria Menjadi Peserta KB Baru
Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Jumlah PB	MOP	Kondom	Jumlah	%
1	2011	27.941	38	1.933	1.971	7.05
2	2012	24.073	10	1.579	1.589	6.60
3	2013	21.449	16	1.218	1.234	5.75
4	2014	23.626	8	2.164	2.172	9.19
5	2015	18.504	40	1817	1.857	10.03

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kesertaan pria dalam ber-KB mengalami penurunan dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2011 peserta KB baru Pria (Kondom dan MOP) sebesar 1.971 akseptor (7,05%). sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1.857 akseptor (10,03%) Ini berarti kesadaran pria dalam KB mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 2.172 akseptor (9,19%) kesadaran ber KB pada pria mengalami kenaikan/penurunan pada tahun 2015 yang sebesar 10,03%.

Grafik (1): Pencapaian Peserta KB Baru Pria di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2011 – 2015



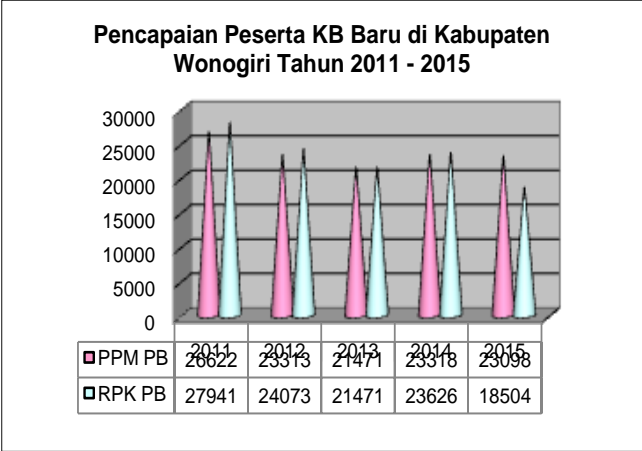
b. Peserta KB Baru Kumulatif.

Secara kumulatif hasil pelayanan peserta KB baru di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat disampaikan sebagai tabel berikut:

Tabel 2.5
Peserta KB Baru Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Wonogiri

Tahun	PPM PB	IUD	MOP	MOW	IMP	Suntik	Pil	Kdm	Jml	%
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
2011	26,622	4,049	38	468	3,271	13,093	5,089	1,933	27,941	104.95
		14.49	0.14	1.67	11.71	46.86	18.21	6.92	100.00	
2012	23.313	3.764	10	400	2.045	12.452	3.823	1.579	24.073	103.26
		15.64	0,04	1,66	8,49	51,73	15.88	6.56	100	
2013	21.471	2.571	53	222	1.886	9.981	5.335	1.423	21.471	99.90
		11.97	0,25	1,03	8,78	46.49	24.85	6.63	100	
2014	23.318	1.609	475	8	2.822	12.396	4.152	2.164	23.626	101.32
		6.81	2.01	0.03	11.94	52.47	17.57	9.16	100	
2015	23.098	1.168	40	269	2.080	9.729	3.401	1.817	18.504	80.11
		5.05	0.17	1.16	9.05	42.12	14.72	7.86	80.13	

Grafik (2): Pencapaian Peserta KB Baru di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2011 – 2015



2. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif

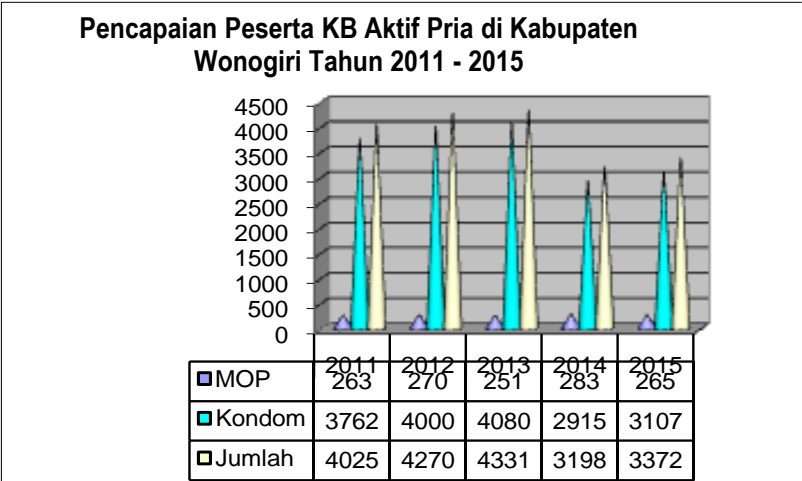
a. Partisipasi Pria Menjadi Peserta KB Aktif

Secara kumulatif perkembangan jumlah peserta KB aktif pria di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2011 s/d 2015 mengalami penurunan, yaitu dari sejumlah 4.025 akseptor (2,20%) pada tahun 2011 menjadi 3.372 akseptor (2.24%) dari total peserta KB aktif yang ada pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan peserta KB aktif pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari 3.198 akseptor (2.02%) dari total peserta KB aktif. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati tabel berikut :

Tabel 2.6
Partisipasi Pria Menjadi Peserta KB Aktif
Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Jumlah PA	MOP	Kondom	Jumlah	%
1	2011	183.059	263	3.762	4.025	2.20
2	2012	186.662	270	4.000	4.270	2.29
3	2013	184.466	251	4.080	4.331	2.35
4	2014	158.060	283	2.915	3.198	2.02
5	2015	150.155	265	3.107	3.372	2.24

Grafik (3) Pencapaian Peserta KB Aktif Pria di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2011 – 2015.



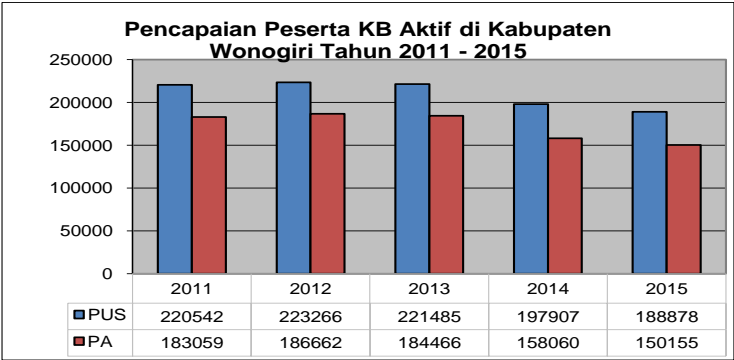
b. Peserta KB Aktif

Perkembangan hasil pembinaan peserta KB aktif (kumulatif) di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Peserta KB Aktif Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Wonogiri

No.	TAHUN	PUS	PA	%
1	2011	220.542	183.059	83.00
2	2012	223.266	186.662	83.61
3	2013	221.485	184.466	83.29
4	2014	197.907	158.060	79.87
5	2015	188.878	150.155	79.50

Grafik (4) Pencapaian Peserta KB Aktif di Kabupaten Wonogiri
dari Tahun 2011 – 2015



3. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif Mandiri

Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri dapat diketahui partisipasi masyarakat menjadi peserta KB Mandiri aktif dapat dicermati tabel 5 berikut:

Tabel 2.8
Partisipasi Masyarakat Menjadi Peserta KB Mandiri Aktif
Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Jumlah PA	PA Mandiri	%
1	2011	183.059	112.639	61.53
2	2012	186.662	113.662	60.89
3	2013	184.466	114.038	61.82
4	2014	158.060	106.233	67.21
5	2015	150.155	101.149	67.36

Grafik (5) Pencapaian Peserta KB Aktif Mandiri di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2011 – 2015.



4. Droup Out

Berdasarkan perhitungan kasar diperoleh Data Droup Out (DO) dari tahun 2011 sampai dengan 2015

Tabel 2.9
Droup Out Kabupaten Wonogiri
Tahun 2011 – 2015

Tahun	PA Awal	PB	PA Seharusnya	PA Sekarang	DO	%
2011	180.397	27.941	208.338	183.059	25.279	14.01
2012	183.059	24.073	207,132	186,662	20,470	11.18
2013	186.662	21.471	208,133	184,466	23,667	12.68
2014	184.466	23.626	208.092	158.060	50.032	27.12
2015	158.060	18504	176.564	150.155	26.409	16.71

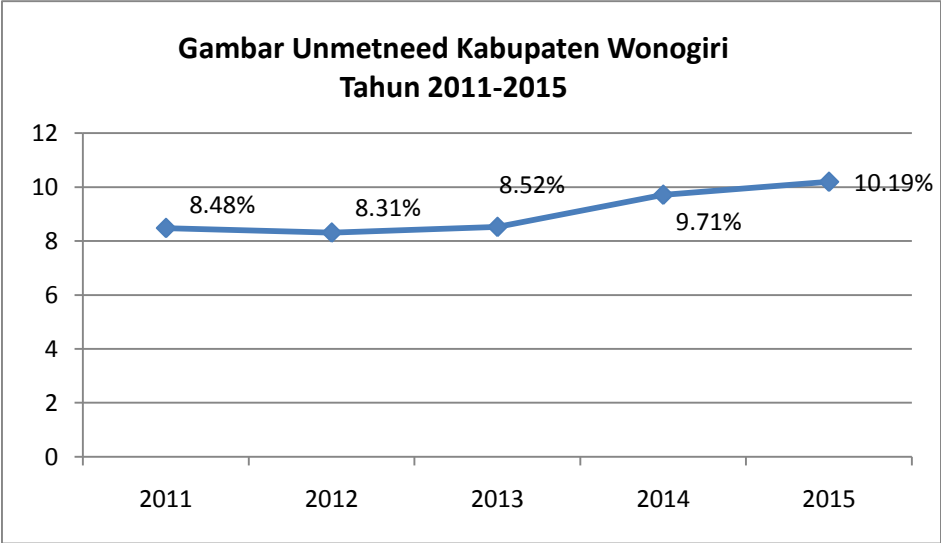
5. Unmetneed

Unmetneed Tahun 2011 mengalami penurunan dari sebesar 18.707 (8,48%) pada tahun 2015 sebesar 19.238 (10,19%). Jika dibandingkan dengan Unmetneed Tahun 2014 sebesar 19.210 (9,71%) maka terjadi kenaikan.

Tabel 2.10
Unmetneed Kabupaten Wonogiri Wonogiri
Tahun 2011 – 2015

No.	TAHUN	PUS	Unmetneed	%
1	2011	220,542	18,707	8.48
2	2012	223.266	18.551	8.31
3	2013	221.485	18.869	8.52
4	2014	197.907	19.210	9.71
5	2015	188.878	19.238	10.19

Grafik (6) Unmetneed Kabupaten Wonogiri
Tahun 2011 – 2015



6. Hasil Efek Dampak Program KB terhadap Aspek Demografi

Keberhasilan Program KB di suatu wilayah diukur dari kondisi CWR, TFR dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Tabel 2.11
Hasil Efek Dampak Terhadap Aspek Demografi
Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2014

NO	TAHUN	CBR	TFR	CWR	GRR	LPP
1	2010	12.69	1.78	236.35	838.63	-0.04
2	2011	13.02	1.82	227.96	808.86	0.55
3	2012					
4	2013	12.17	1.70	225.54	800.27	0.192
5	2014	11.36	1.59	224.41	796.28	-3.12

7. Hasil Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Ada 3 (tiga) indikator utama yang dapat disampaikan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pembinaan terhadap Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), yaitu Petugas PPKBD/SKD, Kader Sub PPKBD (PKB-RW) dan Kader PKB-RT. Sebagaimana kita ketahui bahwa peranan para institusi ini terhadap keberhasilan program KB cukup besar, para institusi merupakan “**UJUNG TOMBAK**” bagi pelaksanaan program KB di lini lapangan.

Perkembangan keberadaan institusi tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.12
Perkembangan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Di Kabupaten Wonogiri

KLASIFIKASI	PPKBD		SUB PPKBD		PKB RT	
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Dasar	5	1.70	195	8.18	645	9.23
Berkembang	170	57.82	1.138	47.73	4.189	59.97
Mandiri	119	40.48	1.051	44.08	2.151	30.79
Total	294	100	2.384	100	6.985	100

Dari tabel diatas dapat diketahui perkembangan IMP di Kabupaten Wonogiri sudah cukup mantap. Secara kualitas masih pada klasifikasi “Berkembang”.

8. Hasil Pembinaan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
a. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) sampai akhir tahun 2014 sebanyak 828 kelompok, dengan klasifikasi:

- Dasar : 347 Kelompok
- Berkembang : 390 Kelompok
- Paripurna : 91 Kelompok

b. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) sampai akhir tahun 2014 sebanyak 128 kelompok, dengan klasifikasi:

- Awal : 77 Kelompok
- Berkembang : 40 Kelompok
- Paripurna : 11 Kelompok

c. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) sampai akhir tahun 2014 sebanyak 332 kelompok.

- Awal : 185 Kelompok
- Berkembang : 128 Kelompok
- Paripurna : 19 Kelompok

d. Kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Jumlah kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sampai akhir tahun 2014 sebanyak 681 kelompok, dengan klasifikasi:

- Dasar : 0 Kelompok
- Berkembang : 0 Kelompok
- Paripurna : 681 Kelompok

e. Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

Pos Pemberdayaan Keluarga telah dilaunching pada tanggal 7 Mei 2013 oleh Bupati Wonogiri H. DANAR RAHMANTO dengan dihadiri Prof. HARYONO SUYONO beserta Tim dari Yayasan Damandiri.

Jumlah Posdaya yang tersebar di 25 Kecamatan Tahun 2013 sebanyak 583 Kelompok yang telah dilaunching pada tanggal 16 s/d 23 Desember 2013 di 25 Kecamatan.

9. Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Respon dari masyarakat maupun tokoh masyarakat terhadap **Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)** cukup **baik** hal ini diwujudkan dalam upaya pembentukan PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja) ditingkat kecamatan.

Sampai akhir tahun 2015 di Kabupaten Wonogiri sudah terbentuk PIK-KRR sebanyak 70 (tujuh puluh) kelompok yang terdiri dari jalur masyarakat 32 kelompok, jalur pendidikan 38 kelompok , dengan klasifikasi :

Klasifikasi	Jalur	Jalur
PIK	Masyarakat	Pendidikan
• Tumbuh	: 15	33
• Tegak	: 10	1
• Tegar	: 7	4
Jumlah	32	38

10. Pembentukan Kelompok KB Pria

Sampai dengan akhir tahun 2015 di Kabupaten Wonogiri terbentuk 25 kelompok KB pria yang berada di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Wonogiri.

11. Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan.

Pendewasaan Usia Perkawinan, dari data yang ada (hasil pendataan keluarga) dapat diketahui umur PUS yang kurang dari 20 tahun adalah sebagai berikut :

- Tahun 2011, sebesar : 2.337 PUS atau 1,06 %
- Tahun 2013, sebesar : 2.354 PUS atau 1,08 %
- Tahun 2014, sebesar : 1.991 PUS atau 1,01 %
- Tahun 2015, sebesar : 1.300 PUS atau 0,74 %

12. Indikator Jumlah Jiwa dibanding KK (Hasil Pendataan Keluarga)

Indikator lain untuk mengetahui keberhasilan program KB adalah rendahnya angka jumlah jiwa terhadap kepala keluarga (KK). Data data yang diolah oleh Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri dengan mengacu hasil pendataan keluarga, maka jumlah jiwa terhadap kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Wonogiri adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13
Perkembangan Jumlah Jiwa Terhadap Kepala Keluarga
Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Rasio
2011	1.106.063	329.676	3,36
2012	1.088.021	327.553	3,32
2013	1.090.115	332.719	3,28
2014	1.058.149	328.187	3,22
2015	1.041.947	330.079	3,16

(Hasil Pendataan Keluarga)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio jumlah jiwa dibanding jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan secara signifikan, dimana pada tahun 2011 rasio jumlah jiwa dibanding jumlah kepala keluarga adalah sebesar 3,36 dan pada tahun 2015 jumlah jiwa dibanding jumlah kepala keluarga sebesar 3,16 atau terjadi penurunan sebesar 0.20 point.

13. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

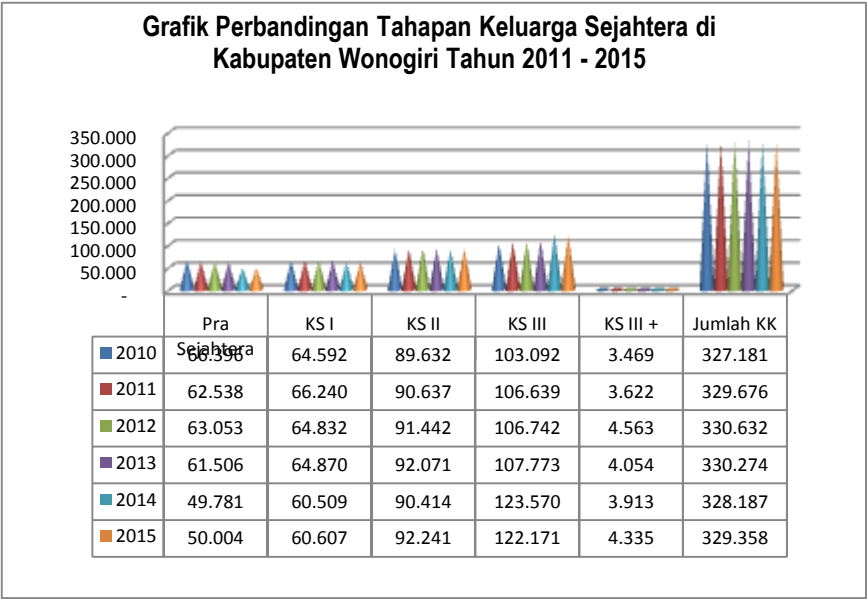
Indikator lain untuk mengetahui keberhasilan program KB adalah tinggi atau rendahnya derajat kesejahteraan keluarga. Dari hasil Pendataan Keluarga yang dikembangkan di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat Jumlah Keluarga Pra Sejahtera mengalami penurunan dari tahun 2011 sebanyak 62.538 KK dan pada tahun 2015 sebanyak 50.004 KK atau turun sebesar 20,04%. Demikian juga untuk Keluarga Sejahtera I juga mengalami penurunan dari tahun 2011 sebanyak 66.240 KK menjadi pada tahun 2015 sebanyak 60.607 KK atau turun sebesar 8,50% Untuk melihat perbandingan dari tahun 2011 s/d 2015 disampaikan sebagaimana table berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera
Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2015

Tahun	Pra Sejahtera	KS I	KS II	KS III	KS III +	Jumlah KK
2011	62.538	66.240	90.637	106.639	3.622	329.676
2012	63.053	64.832	91.442	106.742	4.563	330.632
2013	61.506	64.870	92.071	107.773	4.054	330.274
2014	49.781	60.509	90.414	123.570	3.913	328.187
2015	50.004	60.607	219.211*			329.822

Ket : *)Pendataan Keluarga Th. 2015 sampai Tahapan Keluarga Sejahtera

Grafik (7) Grafik Perbandingan Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2011 dengan Tahun 2015.



14. Capaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

DATA TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2012

Kategori	Korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Seksual	Penelantaran	KDRT	Fisik
Anak	0	39	0	0	28	10	1	0
Dewasa	0	30	69	0	0	0	28	2
Jumlah	0	69	69	0	28	10	29	2
Total	69		69		69			

Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan

Pelayanan	Jumlah
Kesehatan	34 orang
Bantuan Hukum	30 orang
Rehabilitasi Sosial	25 orang

Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2013

Kategori	Korban		Pelaku		Kekerasan		
	L	P	L	P	Fisik	Seksual	Penelantaran
Anak	3	29	44	1	3	25	4
Dewasa	0	14	14	0	6	0	4
Jumlah	3	43	58	1	9	25	8
Total	46		59		42		

Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan

Kategori	Pelayanan				
	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial
Anak	29	0	0	29	15
Dewasa	0	0	0	0	0
Jumlah	29	0	0	29	15

Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2014

Kategori	Korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Fisik	Seksual	Penelantaran	Psikis
Anak	1	30	0	0	1	29	0	1
Dewasa	0	15	50	0	4	4	0	8
Jumlah	1	45	50	0	5	33	0	9
Total	46		50		47			

Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan

Kategori	Pelayanan					
	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Pemulangan Reintegrasi	Rehabilitasi Sosial
Anak	37	33	33	33	37	25
Dewasa	5	0	0	2	0	5
Jumlah	42	33	0	35	37	5

Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2015

Kategori	Korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Fisik	Seksual		KDRT
						L	P	
Anak	1	36	3	0	1	1	32	2
Dewasa	0	5	43	0	0	0	0	5
Jumlah	1	41	46	0	1	33		8
Total	42		46		42			

Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan

Kategori	Pelayanan					
	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Bimbingan Psikolog	Pemulangan Reintegrasi	Rehabilitasi Sosial
Anak	37	33	32	8	0	5
Dewasa	5	0	0		0	0
Jumlah	42	33	33	8	0	5

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BKBKSPP berdasarkan sasaran/target Renstra -PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan -PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Ada 6 indikator kinerja yang diterapkan dalam RPJMD 2010-2015, yang juga dituangkan dalam Ranstra BKBKSPP tahun 2010 – 2015. Indikator yang ada dalam SPM untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 8 Indikator kinerja dan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ada 9 Indikator kinerja sedangkan untuk Indikator kinerja pada MDGs ada 4 Indikator.

Target dan capaian kinerja pada masing-masing Indikator tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.15

**Pencapaian SPM urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Tahun 2011 s/d 2014**

NAMA SPM	SPM		CAPAIAN 2011		CAPAIAN 2012		CAPAIAN 2013		CAPAIAN 2014	
	JENIS PELAYANAN (VARIABEL)	INDIKATOR	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5	10		11	12	13	14	15	16	17	18
Strandar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	P2TP2A	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu : 100%;	50,00	-	100,00	-	100,00	32,20	100,00	32,20
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit : 100% dari sasaran program;	100,00	2,00	100,00	25,00	100,00	56,00	100,00	56,00
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu : 75 %;	50,00	-	50,00	2,00	75,00	42,25	75,00	42,25
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu : 75 %;	50,00	-	50,00	2,00	75,00	38,00	75,00	38,00
		Cakupan penegak hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak : 80%;	50,00	-	50,00	50,00	75,00	18,00	80,00	18,00

Lanjutan

NAMA SPM	SPM		CAPAIAN 2011		CAPAIAN 2012		CAPAIAN 2013		CAPAIAN 2014	
	JENIS PELAYANAN (VARIABEL)	INDIKATOR	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5	10		11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum : 50 %;	50,00	-	50,00	50,00	50,00	80,00	50,00	80,00
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan : 50 %; dan	50,00	-	50,00	25,00	50,00	75,00	50,00	75,00
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan : 100 %.	50,00	-	100,00	25,00	100,00	75,00	100,00	75,00

Pencapaian Target SPM pada Jenis Pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) selama kurun waktu 4 tahun mulai tahun 2011 s/d 2014 yang targetnya terlampaui ada 2 indikator yaitu Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dari target 50% tercapai 80% di Tahun 2014, dan indikator Cakupan layanan pemulangan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dari target 50% tercapai 75% di tahun 2014. Sedangkan 6 indikator lainnya pencapaiannya jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya SDM yang dimiliki sebagai pelaksana P2TP2A.

Tabel 2.16
Pencapaian SPM urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2011 s/d 2014

NAMA SPM	SPM		CAPAIAN 2011		CAPAIAN 2012		CAPAIAN 2013		CAPAIAN 2014	
	JENIS PELAYANAN (VARIABEL)	INDIKATOR	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5	10		11	12	13	14	15	16	17	18
Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS):									
		1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5% pada tahun 2014;	2,00	1,06	2,00	1,06	2,00	1,08	2,00	0,43
		2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif sebesar 65 % pada Tahun 2014;	82,43	83,00	82,44	83,61	82,45	83,29	82,46	79,74
		3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% pada tahun 2014;	7,40	8,48	7,30	8,31	7,20	8,52	7,10	9,70
		4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada tahun 2014;	68,50	86,74	69,00	87,11	69,50	84,21	70,00	82,78
		5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2014;	85,50	86,49	86,00	86,81	86,50	86,83	87,00	87,42
		6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 2 (dua) desa/kelurahan pada tahun 2014;	1:2	1:4	1:2	1:5	1:3	1:6	1:2	1:5

Lanjutan

NAMA SPM	SPM		CAPAIAN 2011		CAPAIAN 2012		CAPAIAN 2013		CAPAIAN 2014	
	JENIS PELAYANAN (VARIABEL)	INDIKATOR	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5	10		11	12	13	14	15	16	17	18
		7. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD pada tahun 2014.	1 Desa 1 PPKBD	1 Desa 1 PPKBD	1 Desa 1 PPKBD	1 Desa 1 PPKBD	1 Desa 1 PPKBD	1 Desa 1 PPKBD	1 Desa 1 PPKBD	1 Desa 1 PPKBD
	b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi:									
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun.	30,00	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-
	c. Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga									
		Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100% pada tahun 2014.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pencapaian target SPM pada Jenis Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama kurun waktu 4 tahun mulai tahun 2011 s/d 2014, dari 7 indikator tersebut ada 4 indikator yang targetnya tercapai diatas 100% sedangkan 3 indikator tidak tercapai. Dari 3 indikator yang tidak tercapai tersebut disebabkan karena jumlah PLKB/PKB yang setiap tahunnya mengalami penurunan diantaranya banyak PLKB/PKB yang alih tugas ke Dinas/Instansi yang lain disamping itu setiap tahun PLKB/PKB ada yang pensiun dan penambahan PNS pada PLKB/PKB tidak sebanding yang keluar.

Untuk pencapaian target SPM pada Jenis Pelayanan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak dapat tercapai karena kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Kabupaten Wonogiri masih tercukupi lewat dropping dari BKKBN Propinsi dan BKKBN Pusat. Sedangkan pencapaian target SPM pada Jenis Pelayanan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga selalu tercapai setiap tahunnya.

Tabel 2.17
Pencapaian Indikator Kinerja pada RPJMD
Tahun 2010 dan 2011

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD THN 2010	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011	
			TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelayanan Penunjang			
1.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
	a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0.63	0.65	0.48
	b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0.36	0.36	0.52
	c. Jumlah KDRT	0.000036	0.000034	0.000077
	d. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0.053	0.052	0.054
2.	KB dan KS			
	a. Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.05	1.04	0.94
	b. Rasio akseptor KB	82,36	82.43	79.87
	c. Rasio Keluarga Pra KS dan KS I	40.03	39.54	39.06

Tabel 2.18
Pencapaian Indikator Kinerja pada RPJMD
Tahun 2012 dan 2013

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD THN 2010	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pelayanan Penunjang					
3.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
	e. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0.63	0.66	0.86	0.67	0.63
	f. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0.36	0.38	0.36	0.40	0.37
	g. Jumlah KDRT	0.000036	0.000033	0.00008	0.000032	0.00004
	h. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0.053	0.051	0.024	0.050	0.057
4.	KB dan KS					
	d. Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.05	1.03	1.02	1.02	0.82
	e. Rasio akseptor KB	82.36	82.44	83.61	82.45	83.28
	f. Rasio Keluarga Pra KS dan KS I	40.03	39.04	38.79	38.54	37.97

Tabel 2.19
Pencapaian Indikator Kinerja pada RPJMD
Tahun 2014 dan 2015

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD THN 2010	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pelayanan Penunjang					
5.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
	i. Persentase partisipasi perempuan di lembaga	0.63	0.71	0.48	0.69	0.46

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD THN 2010	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemerintah					
	j. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0.36	0.42	0.52	0.44	0.44
	k. Jumlah KDRT	0.000036	0.000031	0.000077	0.000030	0.00008
	l. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0.053	0.049	0,054	0.048	0.056
6.	KB dan KS					
	g. Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.05	1.01	0.94	1.00	0.89
	h. Rasio akseptor KB	82,36	82.46	79.87	82.47	79.94
	i. Rasio Keluarga Pra KS dan KS I	40.03	38.04	33.61	37.54	33.56

Aspek Pelayanan Umum

Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan.

Prosentase patisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan merupakan perbandingan antara jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah pekerja perempuan. Dalam tahun 2011 rasio menunjukkan angka 0,62, yang artinya setiap 100 orang pekerja wanita 62 orang diantaranya bekerja di lembaga pemerintahan. Angka tersebut cenderung menurun, hingga menjadi hanya 0,46 di tahun 2015. Penurunan pertanda positif, karena mungkin semakin banyak perempuan yang masuk lapangan kerja di luar pemerintahan, sementara perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan cenderung tetap.

2. Rasio KDRT.

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan gambaran tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Wonogiri. Rasio KDRT di tahun 2011 sebesar 0,00004 artinya di setiap 10.000 RT terdapat 4 KDRT. Angka tersebut meningkat di tahun 2012 menjadi 8 di setiap 100.000 RT, tahun 2013 turun menjadi 4 di setiap 100.000 RT, dan cenderung naik di setiap 100.000 RT di tahun 2014 dan 2015.

3. Prosentase Pekerja Di Bawah Umur.

Prosentase pekerja di bawah umur merupakan perbandingan antara pekerja anak yang berumur 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja. Sekecil apapun angka menunjukkan bahwa masih terjadi kasus anak-anak yang semestinya menikmati pendidikan harus sudah bekerja. Dalam tahun 2011 angka prosentase pekerja di bawah umur sebesar 0,024, dan pada tahun 2015 sebesar 0,056. Semetinya angka ini harus dihilangkan, sehingga tidak ada anak yang masuk lapangan kerja.

B. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga

Jumlah anak per keluarga di Kabupaten Wonogiri cenderung turun, dari sekitar 1,04 di tahun 2010 menjadi 0,89 di tahun 2015. Artinya secara rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 1 anak.

2. Rasio Akseptor KB.

Rasio akseptor KB menggambarkan prosentase jumlah pasangan usia subur yang mengikuti Program Keluarga Berencana. Secara rata-rata dalam periode tahun 2011-2015, Rasio Akseptor KB mencapai 81,83%, artinya 81,83% pasangan usia subur di kabupaten Wonogiri mengikuti program KB.

3. Keluarga Pra KS dan KS I

Jumlah keluarga Pra KS pada tahun 2011 sebanyak 62.538 KK, turun menjadi 50.004 KK tahun 2015. Untuk keluarga yang masuk katagori Keluarga Sejahtera I pada tahun 2011 sebanyak 66.240, meningkat menjadi 66.607 di tahun 2015. Rata-rata Rasio Keluarga Pra Sejahtera terhadap jumlah KK dalam periode tahun 2010-2015 sebesar 17,1% dan rata-rata rasio Keluarga Sejahtera I terhadap jumlah KK di Kabupaten Wonogiri sebesar 19,5%.

Tabel 2.20
Pencapaian Indikator Kinerja pada MDGs
Tahun 2013 s/d 2015

TUJUAN 3 :
MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO.	INDIKATOR	2013	TAHUN 2014		TARGET MDGs 2015	REALISASI Th. 2015
		REALISASI	TARGET	REALISASI		
3.A	Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015					
3.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	11%	20%	9,75%	Meningkat	9.75%

TUJUAN 5
MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

NO.	INDIKATOR	2013	TAHUN 2014		TARGET MDGs 2015	REALISASI Th. 2015
		REALISASI	TARGET	REALISASI		
5.A	Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015					
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Prosentase PUS yang sedang ber KB dibagi jumlah PUS (Pasangan Usia Subur)	83,29%	83%	83,27%	70,6	79,50%
5.4	Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)				22,92	belum ada data
5.6	Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB) yang tidak terpenuhi	8,52	8%	8,11%	5	10,19%

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.5.1. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Tengah.

Hasil telaah terhadap Renstra BKKBN, BKKBN Provinsi Jawa Tengah, BP3AKB Provinsi Jawa Tengah sama-sama menjadikan lembaga yang handal dan dipercaya untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Sejahtera, berdikari dan berkualitas guna mendukung agenda prioritas pembangunan 2015-2019 (NAWA CITA) yang ke lima yaitu “ Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu **“Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Demokratis”**. Kesesuaian pada visi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonogiri (sesuai Tugas Pokok dan Fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri) dengan BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah adalah pada mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi melalui peningkatan kualitas hidup keluarga untuk mendukung NAWA CITA nomor lima yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

Sedangkan Visi, Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah memiliki kesamaan dengan Visi Renstra Kementerian PP dan PA RI yaitu menggunakan frase “Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak”. Demikian juga pada misinya, dimana pada misi keduanya terdapat unsur-unsur “Kualitas Hidup Perempuan dan Anak”, sementara itu dari tujuan sama-sama ingin mewujudkan program Gender dan Anak untuk meningkatkan IPG dan IDG, serta memberikan perlindungan perempuan dan anak. Pada Sasaran strategisnya sama-sama ingin mewujudkan Pemerintah Daerah yang responsif gender dan anak untuk meningkatkan IPG dan IDG, serta memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sedangkan untuk arah kebijakan adalah memperkuat kelembagaan PUG untuk mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan responsif gender di seluruh bidang pembangunan; memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.

Kesesuaian dengan visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri) adalah mewujudkan generasi yang bermoral, berbudi pekerti mulia, sopan, santun serta menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, adat istiadat masyarakat Wonogiri, pembangunan berkeadilan ditandai dengan pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak

2.5.2. Telaah terhadap dokumen RT RW .

Beberapa muatan yang harus ada dalam dokumen RTRW sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Wonogiri tahun 2010 – 2030 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 antara lain adalah tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem

perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Pusat kegiatan perkotaan terdiri atas:

- a. PKL berupa Perkotaan Wonogiri.
- b. PKLp meliputi: Perkotaan Purwantoro, Perkotaan Pracimantoro dan Perkotaan Baturetno.
- c. PPK meliputi: Perkotaan Eromoko, Manyaran, Ngadirojo, Tirtomoyo, Kismantoro, Paranggupito, Giritontro, Batuwarno, Karangtengah, Nguntoronadi, Jatiroto, Bulukerto, Puhpelem, Giriwoyo, Jatipurno, Girimarto, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro dan Sidoharjo.

Sedangkan pusat kegiatan perdesaan meliputi seluruh kecamatan di kabupaten Wonogiri. Kawasan lindung terdiri atas: kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Kawasan budidaya terdiri atas: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Penetapan Kawasan Strategis pada RTRW Kabupaten Wonogiri terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan strategis provinsi terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten), kawasan koridor perbatasan Pacitan – Wonogiri – Wonosari (Pawonsari), kawasan koridor jalur lintas selatan dan pesisir Jawa Tengah, dan kawasan agropolitan Jawa Tengah.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa berupa Kawasan Karst Pracimantoro meliputi: Kecamatan Eromoko, Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Paranggupito, dan Kecamatan Giriwoyo.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: kawasan perkotaan Wonogiri, kawasan perkotaan Pracimantoro, kawasan perkotaan Purwantoro, kawasan perkotaan Baturetno, kawasan sekitar terminal penumpang tipe A, dan kawasan koridor pantai selatan;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa situs cagar budaya meliputi: Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Tirtomoyo, dan Kecamatan Girimarto;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Waduk Serba Guna Wonogiri;
- d. kawasan strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup meliputi: Sub DAS Keduang, Sub DAS Wuryantoro, Sub DAS Wiroko, Sub DAS Temon, Sub DAS Alang Ngunggahan, Sub DAS Solo Hulu.

2.5.3. Telaah terhadap dokumen KLHS.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dalam KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 Program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja, Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan Program Wonogiri Sehat dan Wonogiri Beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, mengedepankan sikap toleransi antar umat.

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada antar lain:

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Misi 6 : Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang.

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada antara lain :

- Program Perluasan Kerja Masyarakat miskin.

Misi 7 : Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Keselamatan Rakyat Wonogiri.

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada antara lain :

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Tengah, KLHS serta RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Kelemahan (*Weakness*) dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- Terbatasnya tenaga PLKB/PKB sebagai pelaksana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB PK) di Tingkat Lini Lapangan, dengan rasio jumlah PLKB/PKB terhadap Jumlah Desa/Kelurahan 1 : 7, artinya 1 PLKB/PKB mempunyai wilayah binaan 6-7 Desa/Kelurahan, sehingga pelaksanaan Program KKB PK di daerah kurang maksimal.
- Belum maksimalnya komitmen pada pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mendukung pelaksanaan program KKB PK dilihat dari kebijakan yang diambil belum menempatkan program KKB PK sebagai Prioritas Pembangunan Daerah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Kelebihan/Kekuatan yang telah dimiliki saat ini dalam mendukung pelaksanaan Program KKB PK mulai dari tingkat lini lapangan sebagai berikut :

- Masih kuatnya jaringan program oleh Institusi Masyarakat Pedesaan dengan adanya PPKBD ditingkat Desa/Kelurahan sebanyak 294 orang dan Sub PPKBD di tingkat Dusun atau RW sebanyak 2.371 orang yang siap membantu PLKB/PKB.
- Telah terbangunnya Gedung Balai Penyuluhan KB disetiap Kecamatan lengkap dengan sarana dan prasarannya yang dapat dimaksimalkan penggunaannya sebagai pusat pelayanan Edukasi, Informasi dan Konseling KB, sebagai tempat untuk berkoordinasi dengan masyarakat, mitra kerja, instansi lain dalam pelaksanaan program KKB PK di tingkat Kecamatan.
- Dukungan Alat Kontrasepsi dari Pusat yang mampu memenuhi kebutuhan Permintaan Masyarakat.
- Tenaga medis yang terlatih sebagai pelaksanaan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi telah tersebar di 25 Kecamatan.
- Terbentuknya Pusat Informarsi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dari jalur masyarakat sebanyak 32 kelompok dan dari jalur pendidikan sebanyak 38 kelompok.

Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan Program KKB PK di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

Tantangan :

- Banyaknya ketertarikan Remaja Wonogiri yang ingin merantau ke Kota.
- Informasi dari luar yang menyesatkan adanya kemajuan teknologi
- Tingginya Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terlayani.
- Kurangnya minat Pria untuk ber KB.
- KIE Program Pembangunan Keluarga semakin berat.
- Kader Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang sedikit sehingga satu Kader banyak yang merangkap beberapa Poktan.
- IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang terdiri dari PPKBD, Sub PPKBD yang berpengetahuan rendah sering mengundurkan diri/keluar.

Peluang :

- Dengan adanya pabrik-pabrik yang ada di Wonogiri menyebabkan Remaja di Wonogiri bisa mengurangi Remaja Merantau.
- Belum seluruhnya Sekolah dan Perguruan Tinggi terbentuk PIK Jalur Pendidikan.
- Jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan tenaga medis yang terlatih dalam pemasangan/pencabutan alat kontrasepsi.
- Pemberdayaan PPKBD dan Sub PPKBD untuk melaksanakan Konseling Informasi dan Edukasi kepada masyarakat disekitar tempat tinggalnya tentang Program KKB PK di masing-masing Desa/Kelurahan.

- Mengaktifkan peran Kelompok KB Pria yang telah terbentuk di 25 Kecamatan dalam pelaksanaan KIE KB Pria dilingkungan sekitarnya.
- Adanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di tingkat Kabupaten, harapannya bisa memberikan pencerahan dan KIE tentang program KKBPK.
- Adanya pembinaan terhadap kader BKB, BKR, BKL, UPPKS secara berkala dalam rangka peningkatan pengetahuan Kader.
- Pemberian Honor kepada PPKBD dan Sub PPKBD setiap bulannya untuk mendukung kegiatan IMP.

Kelemahan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

- Belum maksimalnya pengelolaan P2TP2A di 25 Kecamatan karena keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitasnya.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Belum adanya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan tempat-tempat publik untuk praktek asusila.

Kelebihan/Kekuatan yang dimiliki dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

- Telah adanya kesepakatan kerjasama dengan Mitra Kerja yang terdiri dari Organisasi Masyarakat dan Organisasi Swasta maupun dengan Dinas/Instansi lain dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Telah ditandatanganinya deklarasi Puskesmas, Sekolah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Layak/Ramah Anak pada Tahun 2014.
- Terbentuknya Pawon Emak di 25 Kecamatan pada Tahun 2013.
- Adanya pendampingan baik dari psikolog, bantuan hukum dan rehabilitasi terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tantangan :

- Banyaknya orang tua yang memantau menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat.
- Kemajuan teknologi membuat anak mudah mengakses gambar-gambar porno sehingga berpengaruh pada perilaku anak.
- Kurangnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama, sikap perilaku dan budi pekerti kepada anak.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

- Kurangnya SDM dalam menangani kasus dan pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di setiap Kecamatan.

Peluang :

- Memaksimalkan Forum Anak sebagai ajang peningkatan kualitas hidup anak.
- Keterlibatan Anak dalam perencanaan pembangunan.
- Mengaktifkan peran Mitra Kerja dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Terbentuknya P2TP2A Kabupaten dan P2TP2A Kecamatan sehingga Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan segera bisa ditangani.
- Menanamkan nilai-nilai agama dan budi perkerti melalui pendidikan formal maupun non formal di semua jenjang pendidikan.

Dari uraian diatas maka dapat ditentukan kebutuhan layanan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat lima tahun kedepan untuk mengatasi tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja
2. Peningkatan pengetahuan manajemen dan pelatihan usaha bagi kelompok UPPKS.
3. Pembuatan Galeri UPPKS dengan fokus lokasi di kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu perkotaan Wonogiri, perkotaan Pracimantoro, perkotaan Purwantoro, perkotaan Baturetno, kawasan sekitar terminal tipe A, dan kawasan koridor pantai selatan;
4. Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi terutama di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah galciltas.
5. Peningkatan Pembinaan Kelompok Tri Bina.
6. Pengadaan KKA dan APE.
(tantangan : Tingginya Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB yang tidak terlayani).
7. Peningkatan Pembinaan Kelompok Prio Utomo.
8. Pemberian bantuan Sosial bagi peserta KB MOP
9. Peningkatan Pelayanan KB Medis Operasi
(tantangan : Kurangnya minat Pria untuk ber KB)
10. Peningkatan Pelayanan KIE.
11. Peningkatan Penyelenggaraan KB Keliling.
12. Peningkatan Pelayanan konseling KB
13. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
14. Pembentukan Kampung KB.
15. Pengembangan Posdaya.

16. Pemberian Penghargaan bagi kelompok kegiatan KB dan IMP terbaik, Akseptor Iestari, Keluarga Harmonis, dan PLKB.

(tantangan : KIE Program Pembangunan Keluarga semakin berat).

17. Peningkatan Pembinaan dan pemberian bantuan kader Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL dan UPPKS.

(tantangan : Kader Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang sedikit sehingga satu Kader banyak yang merangkap beberapa Poktan).

18. Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD).

19. Pengiriman jambore ke tingkat Provinsi untuk IMP, Tri bina, UPPKS dan Saka Kencana.

(tantangan : IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang terdiri dari PPKBD, Sub PPKBD yang berpengetahuan rendah sering mengundurkan diri/keluar)

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Peningkatan Advokasi Komisi Perlindungan Anak.

2. Peningkatan Pengembangan Materi KIE tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keadilan dan kesetaraan gender.

3. Peningkatan Koordinasi Anggota Focal Point.

4. Peningkatan Penguatan Kelembagaan Forum Anak.

5. Peningkatan Penguatan P2TP2A.

6. Peningkatan Penyediaan Data dan Informasi tentang PUG, Anak dan Penanganan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

7. Peningkatan Koordinasi Pokja PUG.

8. Peningkatan PPRG.

9. Peningkatan Advokasi Pengembangan KLA.

10. Peningkatan Sistem Pencatatan KDRT.

11. Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia.

12. Peningkatan Advokasi Hari Tanpa Kekerasan.

13. Peningkatan Pelatihan dan Ketrampilan Usaha Kecil Perempuan.

14. Peningkatan Penguatan Kapasitas Perempuan.

(tantangan : Banyaknya orang tua yang memantau menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat).

(tantangan : Kemajuan teknologi membuat anak mudah mengakses gambar-gambar porno sehingga berpengaruh pada perilaku anak).

(tantangan : Kurangnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama, sikap perilaku dan budi pekerti kepada anak).

(tantangan : Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan).

(tantangan : Kurangnya SDM dalam menangani kasus dan pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di setiap Kecamatan).

Dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibutuhkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun Dana dari Pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Dekonsentrasi.

Selama 5 (lima) tahun terakhir Anggaran untuk pelaksanaan pelayanan BKBKSPP kabupaten Wonogiri sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21
Anggaran Pendanaan Pelayanan SKPD BKBKSPP
Kabupaten Wonogiri

ANGGARAN	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	JUMLAH
APBD KAB.	2.315.312.000	2.928.927.500	5.009.730.500	4.943.964.500	5.780.371.665	20.978.306.165
APBD PROV	-	-	-	-	-	-
APBN PUSAT	1.951.435.000	1.012.728.000	2.476.871.000	3.692.101.000	2.664.839.000	11.797.974.000
JUMLAH	4.266.747.000	3.941.655.500	7.486.601.500	8.636.065.500	8.445.210.665	32.776.280.165

Sedangkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pelayanan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2016 s/d 2021) sebagaimana diuraikan dalam BAB V Renstra BKBKSPP Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun sebelumnya Renstra BKBKSPP Kabupaten Wonogiri telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri belum optimal.

- d. Belum optimalnya data dan informasi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumen penting lainnya.
 - f. Belum optimalnya pengelolaan web site BKBKSPP Kabupaten Wonogiri.
2. Bidang Keluarga Berencana
- a. Masih tingginya Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) sebesar 10,19
 - b. Masih tingginya angka Droup Out peserta KB.
 - c. Rendahnya kesertaan ber KB Pria khususnya MOP.
 - d. Banyaknya pernikahan dini.
 - e. Rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan jumlah peserta Non MKJP.
 - f. Belum Optimalnya peran Kelompok KB Pria dalam keikutsertaan Advokasi dan KIE KB di lingkungan tempat tinggalnya.
 - g. Belum Optimalnya peran Fapsedu dan Koalisi Kependudukan dalam pengendalian penduduk dan KB.
3. Bidang Keluarga Sejahtera.
- a. Pengelolaan data dan informasi kelompok kegiatan (Tri Bina dan UPPKS) belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.
 - b. Belum optimalnya pembinaan kelompok UPPKS sehingga belum secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.
 - c. Peran PPKBD dan Sub PPKBD belum optimal dalam penggerakan KB MKJP.
 - d. Kurangnya peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB.
 - e. Belum berfungsinya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang telah terbentuk.
 - f. Belum tertibnya dokumen hasil pendataan selama lima tahun.
 - g. Masih tingginya rasio Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.
 - h. Belum optimalnya peran keluarga dalam pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- a. Belum adanya data tentang anak.
 - b. Belum optimalnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah yang ramah anak.
 - c. Belum optimalnya peran forum anak untuk peningkatan kualitas hidup anak.
 - d. Kurangnya pengetahuan keluarga dalam penanaman nilai-nilai agama, budi perkerti, sikap dan prilaku serta pergaulan yang sehat pada anak.

- e. Masih rendahnya empaty masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak dilingkungannya.
- f. Darurat kekerasan seksual terhadap anak.
- g. Kurangnya pengetahuan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan.
- h. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga parlemen.
- i. Rendahnya partisipasi perempuan yang menduduki jabatan baik di Pemerintahan maupun di Swasta.
- j. Belum optimalnya P2TP2A yang telah terbentuk di setiap Kecamatan dalam pencegahan dan penganganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, permasalahan dan isu strategis untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun gap nya tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas.

a. Permasalahan

- 1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang, sekitar 0,45 bekerja di lembaga pemerintahan;
- 2) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi, sebesar 8 di setiap 100.000 Rumah Tangga;
- 3) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah, hal ini ditandai dengan masih adanya pekerja anak dibawah umur sekitar 0,056;
- 4) Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;
- 5) Perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media masih kurang.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Wonogiri cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.

a. Permasalahan

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
- 2) Tingkat partisipasi KB masih rendah, baru sekitar 79,94 persen;
- 3) Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang;
- 4) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- 6) Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi;
- 7) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal, jumlah keluarga pra KS pada tahun 2015 sebesar 66.240 KK;
- 8) Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri**

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
	Indikator SPM :					
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;	32,20%	100%	Pelatihan bagi petugas P2TP2A	Petugas P2TP2A yang belum pernah mengikuti pelatihan karena kesibukan profesinya diluar P2TP2A	Kurangnya/belum adanya petugas terlatih.
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit;	56,00%	100%	Meningkatkan Intensitas Pertemuan/Koordinasi dengan SKPD terkait dan melibatkan dalam pelatihan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk pelaksanaan pelatihan	Komitmen Pimpinan Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pengiriman petugas penanganan tindak kekerasan untuk mengikuti pelatihan	Belum maksimalnya kerjasama keterpaduan kerja dengan SKPD terkait
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;	42,25%	75%	Meningkatkan Intensitas Pertemuan/Koordinasi dengan SKPD terkait dan melibatkan dalam pelatihan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar SKPD dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan rehabilitasi sosial penanganan tindak kekerasan	Kurangnya/kerjasama keterpaduan kerja Belum adanya petugas terlatih
4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu ;	38,00%	75%	Pelatihan bagi petugas bimbingan rohani dalam P2TP2A	Komitmen pimpinan dalam pengiriman petugas bimbingan rohani penanganan tindak kekerasan untuk mengikuti pelatihan	Belum adanya kerjasama/keterpaduan kerja serta Belum adanya petugas terlatih

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
	Indikator SPM :					
5	Cakupan penegak hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;	18,00%	80%	Meningkatkan Komitmen Jajaran Penegak Hukum dan Pemangku kebijakan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perbedaan sudut pandang dalam penindakan kasus-kasus kekerasan	Belum adanya Kerjasama lintas sektoral
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ;	80,00%	50%	Meningkatkan pendampingan hukum pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kesiapan petugas dalam pendampingan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan	
7	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;	75,00%	50%	Meningkatkan pendampingan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kerjasama antar SKPD dalam pemulihan korban kekerasan	
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	75,00%	100%	Meningkatkan koordinasi antar SKPD yang melayani masalah sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Komitmen penganggaran rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan	Belum terintegrasinya kebutuhan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada penganggaran SKPD terkait

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
	Indikator SPM :					
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	0,43%	3,50%	Meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja dan keluarganya.	Penyuluhan bagi Calon Pengantin tentang Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Kementrian Agama di tingkat Kecamatan	Belum maksimalnya petugas BP4 dalam ikut memberikan pengetahuan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
10	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif ;	79.74%	65.00%	Meningkatkan peran aktif seluruh petugas lini lapangan dan mitra kerja dalam pelaksanaan program KKB PK	Komitmen para pebangku Kebijakan dalam menempatkan program KKB PK sebagai prioritas pembangunan	Belum menempatkan program KKB PK pada prioritas pembangunan
11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need);	9.70%	5.00%	Meningkatkan pergerakan KB dengan memfokuskan pada PUS yang ingin ber KB	Meningkatkan koordinasi pergerakan KB pada moment-moment tertentu pada peringatan Hari-hari Nasional.	Belum adanya integrasi pada setiap kegiatan moment-moment tertentu Peringatan Hari-Hari Nasional tentang pergerakan program KKB PK
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB ;	82.78%	70.00%	Meningkatkan pertemuan kelompok BKB	Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan terpadu BKB Holistik terintegrasi	Belum adanya komitmen dalam pelaksanaan kegiatan BKB Holistik terintegrasi

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
	Indikator SPM :					
13	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% ;	87.42%	87.00%	Meningkatkan kesertaan ber KB bagi anggota UPPKS Pra Sejahtera dan Sejahtera I	Bekerja sama dalam penanganan Kemiskinan	Belum adanya komitmen dalam penanganan Kemiskinan dan evaluasi semua SKPD yang terlibat
14	Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 2 (dua) desa/kelurahan;	1:5	1:2	Mengusulkan penambahan tenaga penyuluh lapangan KB melalui pengadaan CPNS ke pusat maupun Kabupaten.	SKPD Kepegawaian Mengakomodir kebutuhan Tenaga Penyuluh lapangan KB melalui Pengadaan CPNS	Penambahan tenaga penyuluh lapangan KB (Pengadaan CPNS) yang sangat kecil tidak sebanding dengan kebutuhan
15	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD .	1 Desa 1 PPKBD	1 Desa 1 PPKBD	Melakukan regenerasi bagi petugas PPKBD yang lanjut usia	Komitmen para Kepala Desa/Kelurahan dalam penunjukan petugas PPKBD	Pergantian PPKBD belum seluruhnya disampaikan

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
	Indikator RPJMD :					
16	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,46	0,69	Meningkatkan sosialisasi peningkatan kualitas perempuan di segala bidang	Persepsi terhadap kompetensi jabatan	Penempatan jabatan belum responsif gender
17	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0,44	0,44	Meningkatkan sosialisasi peran perempuan dalam pembangunan	Kebijakan dalam bidang investasi daerah	Masih didominasi sebagai buruh baik pada pabrik maupun toko
18	Rasio KDRT	0,00008	0,003	Pembentukan P2TP2A di semua Kecamatan	Keterlibatan SKPD lain dalam Sosialisasi KDRT	Kurangnya SDM dalam penanganan kasus KDRT
19	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,056	0,048	Meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan anak	Kondisi ekonomi masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat terutama keluarga dalam perlindungan anak
20	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,89	1,00	Meningkatkan Advokasi dan KIE KB	Komitmen Pemangku Kebijakan penempatan program KKB PK dalam prioritas pembangunan	Kurangnya koordinasi untuk meningkatkan peran Toga dan Toma dalam KIE KKB PK di lini lapangan
21	Rasio akseptor KB	79,94	82,47	Meningkatkan peran PPKBD dan Sub PPKBD dalam pelaksanaan program KKB PK di lini lapangan	Regulasi dalam pelayanan KB di Puskesmas	Kurangnya tenaga penyuluh KB (PLKB/PKB) karena pensiun
22	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	33,56	37,54	Meningkatkan ekonomi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	Keyakinan masyarakat banyak anak banyak rejeki	Kurangnya anggota UPPKS Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang ber KB

3.2. TELAAH VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wonogiri tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri terpilih tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016- 2021 hasil pilkada 9 Desember 2015 adalah:

Visi :

“MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS”.

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas, maka BKBKSPP Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.

BKBSPP Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak.

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun kedepan peran BKBSPP Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi 5 tahun kedepan	Peran BKBSPP
1	2	3
1	SUKSES : Wonogiri sukses adalah kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan MANAJEMEN SUKSES (Stabilitas, Undang-Undang, Koordinasi, Sasaran, Evaluasi dan Semangat Juang) menjadi pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan agar berhasil dan sejajar dengan daerah lainnya. Pemerintahan dengan manajemen sukses indikatornya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya.	
2	BERIMAN : Wonogiri yang beriman adalah mewujudkan masyarakat yang hidup berkeTuhanan dimana keadaan jiwa dan raganya merasakan kedamaian dan ketentraman menjalankan kegiatan keagamaan masing-masing. Masyarakat yang beriman indikatornya adalah meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.	
3	BERBUDAYA : Wonogiri berbudaya adalah mewujudkan masyarakat wonogiri yang memiliki perilaku dan tingkah laku yang berakal budi dengan mengembangkan budaya dan adat istiadat yang dari generasi ke generasi. Manusia berbudaya diartikan sebagai manusia yang dalam kehidupannya berperilaku baik, bermoral, sopan dan santun terhadap sesama	Melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan didukung bidang lainnya melalui kegiatan-kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan SKPD lain yang terkait untuk meningkatkan kualitas hidup anak menuju generasi yang bermoral, berbudi

	manusia atau makhluk ciptaan Tuhan. Keberhasilan wonogiri yang berbudaya adalah terbinanya dan terlestariannya adat istiadat, budaya dan tradisi yang ada di masyarakat.	perkerti mulia, sopan, santun serta menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, adat istiadat masyarakat Wonogiri.
4	MEMBANGUN WONOGIRI YANG BERKEADILAN yaitu : Pembangunan berkeadilan dirancang secara adil dan merata dengan melibatkan seluruh masyarakat secara aktif, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat wonogiri. Pembangunan berkeadilan ditandai dengan pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak.	Melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan didukung bidang lainnya diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “Wonogiri yang berkeadilan” melalui, kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak.
5	MEMBANGUN WONOGIRI YANG BERDAYA SAING yaitu : Wonogiri yang berdayasaing merupakan kondisi unggul yang memungkinkan terjadinya peningkatan keberdayaan pemerintahan dan masyarakat Wonogiri, melalui pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien sehingga memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan guna melangsungkan kehidupan dalam persaingan masyarakat global untuk memiliki daya akselerasi dalam mewujudkan peningkatan pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan menuju kesejahteraan masyarakat. Berdaya saing ditandai dengan meningkatnya kinerja ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan sistem ekonomi kerakyataan daerah bertumpu pada potensi unggulan.	Melalui Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera serta didukung bidang lainnya dalam pengendalian penduduk, mengatur kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan kematian ibu melahirkan, menekan angka pernikahan dini, meningkatkan ekonomi keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I menuju masyarakat wonogiri berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan melalui tujuh misi sebagai berikut :

1. Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri

Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat;

3. Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa;
4. Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama Daerah-Daerah Lain;
5. Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri;
6. Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang;
7. Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri.

Dari ketujuh Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas, maka misi ke dua, misi ke enam dan misi ketujuh adalah misi yang harus di emban Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan. Misi ke dua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri dengan pengendalian penduduk, meningkatkan kualitas hidup anak dan kesetaraan gender.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ikut mengemban misi kedua bersama Perangkat Daerah yang lain, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan, yang berperan dalam pengendalian penduduk, mengatur kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan kematian ibu melahirkan, menekan angka pernikahan dini, meningkatkan ekonomi keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I menuju masyarakat wonogiri berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, dengan melaksanakan :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD PROVINSI JAWA TENGAH

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKBKSP Kabupaten Wonogiri yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah

diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

BKBKSPP Kabupaten Wonogiri adalah Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu : Kementerian Kesehatan yang didalamnya adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dikaitkan dengan telaah Renstra Kementerian dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 memiliki kaitan yang erat dengan Renstra BKBKSPP Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021 Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian tersebut dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

3.3.1. Telaah Renstra pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah.

Pada Agenda Prioritas Pembangunan 2015-2019 No. 5 (lima) yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.”

Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia Visi BKKBN adalah dengan menjadi **“Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”**, sejalan dengan Visi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 yaitu **“Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Keluarga Kecil menuju masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari”** dan Visi BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 **“Menjadi Lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Kecil Sejahtera”**.

Dari visi-visi diatas sama-sama menjadikan lembaga yang handal dan dipercaya untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Sejahtera, berdikari dan berkualitas guna mendukung agenda prioritas pembangunan 2015-2019 (NAWA CITA) yang ke lima yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu **“Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Demokratis”**. Kesesuaian pada visi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonogiri (sesuai Tugas Pokok dan Fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri) dengan BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah adalah pada mewujudkan masyarakat yang memiliki

daya saing yang tinggi melalui peningkatan kualitas hidup keluarga untuk mendukung NAWA CITA nomor lima yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

Pada Misi ada kesesuaian antara Renstra BKKBN, Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah yaitu Melembagakan Keluarga Kecil Sejahtera dan Mempercepat pencapaian ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Sedangkan pada Sasaran ada kesesuaian dalam hal : meningkatkan kesertaan ber KB; meningkatkan usia perkawinan; menurunkan CPR, Drop Out, Unmet *need*.

Telaah terhadap Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019, Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang mempengaruhi pelayanan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri dilihat dari faktor mendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat :

- a. SKPD Provinsi belum menjalankan seluruh amanat Renstra BKKBN, tetapi hanya menjalankan sebagian yang menjadi tupoksinya.
- b. Program dan Kebijakan di dalam Renstra BKKBN belum seluruhnya dilaksanakan oleh BP3AKB, sesuai dengan Program dan Kegiatan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi acuan kegiatan SKPD KB di daerah, sementara RPJMD Provinsi belum seluruhnya mengakomodasi program-program yang diselaraskan dengan program Nasional.
- c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM SKPD KB di Provinsi dalam pelaksanaan agenda program KB dan KS.

2. Faktor Pendorong :

- a. Adanya kebijakan tentang Pembangunan Kependudukan di daerah.
- b. Adanya Perwakilan BKKBN di Provinsi sehingga dapat mendorong ketercapaian target-target yang telah ditetapkan secara Nasional.
- c. Terakomodirnya Program dan Kegiatan dalam RPJMD Kabupaten sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Adanya Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik untuk menunjang pencapaian target Nasional.
- e. Adanya koordinasi dan komitmen yang kuat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten terkait dengan Kelembagaan.

3.3.2. Telaah Renstra pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah.

Dilihat dari Visi, Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah memiliki kesamaan yaitu menggunakan frase “Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak”. Demikian juga pada misinya, dimana pada misi keduanya terdapat unsur-unsur “Kualitas Hidup Perempuan dan Anak”, sementara itu dari tujuan sama-sama ingin mewujudkan program Gender dan Anak untuk meningkatkan IPG dan IDG, serta memberikan perlindungan perempuan dan anak. Pada Sasaran strategisnya sama-sama ingin mewujudkan Pemerintah Daerah yang responsif gender dan anak untuk meningkatkan IPG dan IDG, serta memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sedangkan untuk arah kebijakan adalah memperkuat kelembagaan PUG untuk mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan responsif gender di seluruh bidang pembangunan; memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.

Kesesuaian dengan visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri) adalah mewujudkan generasi yang bermoral, berbudi pekerti mulia, sopan, santun serta menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, adat istiadat masyarakat Wonogiri, pembangunan berkeadilan ditandai dengan pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu :

1. Faktor Penghambat :

- a. Adanya perbedaan antara urusan PP dan PA antar daerah dan pusat, sehingga seringkali urusan daerah tidak tertampung pada urusan dan dokumen perencanaan Kementerian PP dan PA.
- b. Belum tersedianya panduan pelaksanaan PPRG dan PUHA yang jelas dengan menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang berbeda dengan pusat.
- c. Terbatasnya kapasitas SDM daerah dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, sementara TOT untuk fasilitator masih sangat kurang disebabkan terbatasnya tenaga fasilitator baik di SKPD Provinsi maupun di Kabupaten.
- d. Belum adanya modul dan standar yang jelas untuk pelatihan tenaga bagi tenaga pelayanan terpadu (tenaga pengaduan, tenaga medis, tenaga rehab sosial dll).
- e. Perbedaan waktu penyusunan dokumen perencanaan baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten sering kali terdapat program dan kegiatan di Kementerian PP dan PA RI yang tidak dapat ditampung dalam dokumen perencanaan daerah.

2. Faktor Pendorong :

- a. Komitmen yang kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan PPRG, dan semangat Tim driver untuk mengembangkan PPRG sampai ke tingkat Kecamatan.
- b. Adanya kebijakan daerah yang diterbitkan untuk mendorong implementasi kebijakan pusat, baik PUG, pemberdayaan Perempuan maupun Tumbuh Kembang dan perlindungan anak.
- c. Adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan yang mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen di daerah harus memperhatikan dokumen perencanaan di pusat dan dorongan dari Kementerian PP dan PA RI kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kebijakan Pusat.
- d. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam upaya melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah.
- e. Adanya Kebijakan yang wajib dilaksanakan sampai ke daerah dalam upaya melembagakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mewujudkan wilayah ramah anak.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BKBKSP Kabupaten Wonogiri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Berdasarkan muatan yang ada dalam dokumen RTRW sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Wonogiri tahun 2010 – 2030 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, Pusat kegiatan perkotaan terdiri atas:

- a. PKL berupa Perkotaan Wonogiri.
- b. PKLp meliputi: Perkotaan Purwantoro, Perkotaan Pracimantoro dan Perkotaan Baturetno.
- c. PPK meliputi: Perkotaan Eromoko, Manyaran, Ngadirojo, Tirtomoyo, Kismantoro, Paranggupito, Giritontro, Batuwarno, Karangtengah, Nguntoronadi, Jatiroto, Bulukerto, Puhpelem, Giriwoyo, Jatipurno, Girimarto, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro dan Sidoharjo.

Sedangkan pusat kegiatan perdesaan meliputi seluruh kecamatan di kabupaten Wonogiri. Kawasan lindung terdiri atas: kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana

alam, dan kawasan lindung geologi. Kawasan budidaya terdiri atas: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Penetapan Kawasan Strategis pada RTRW Kabupaten Wonogiri terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan strategis provinsi terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten), kawasan koridor perbatasan Pacitan – Wonogiri – Wonosari (Pawonsari), kawasan koridor jalur lintas selatan dan pesisir Jawa Tengah, dan kawasan agropolitan Jawa Tengah.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa berupa Kawasan Karst Pracimantoro meliputi: Kecamatan Eromoko, Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Paranggupito, dan Kecamatan Giriwoyo.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: kawasan perkotaan Wonogiri, kawasan perkotaan Pracimantoro, kawasan perkotaan Purwantoro, kawasan perkotaan Baturetno, kawasan sekitar terminal penumpang tipe A, dan kawasan koridor pantai selatan;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa situs cagar budaya meliputi: Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Tirtomoyo, dan Kecamatan Girimarto;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Waduk Serba Guna Wonogiri;
- d. kawasan strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup meliputi: Sub DAS Keduang, Sub DAS Wuryantoro, Sub DAS Wiroko, Sub DAS Temon, Sub DAS Alang Ngunggahan, Sub DAS Solo Hulu.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dalam KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 Program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja, Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan Program Wonogiri Sehat dan Wonogiri Beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, mengedepankan sikap toleransi antar umat.

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada antar lain:

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Misi 6 : Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang.

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada antara lain :

- Program Perluasan Kerja Masyarakat miskin.

Misi 7 : Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Keselamatan Rakyat Wonogiri.

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada antara lain :

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

3.5.1. Isu Strategis Ururan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

3.5.2. Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Isu Strategis pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

4.1.1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan ditinggirkan, rasa terkucil dan dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman.

Dengan jumlah penduduk yang masih sangat besar dan jumlah lahan tidak bertambah luas maka peningkatan kualitas penduduk menjadi salah satu target utama dari pengukuran kinerja Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri adalah pengendalian penduduk melalui pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta mengatasi permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, keadilan dan kesetaraan gender untuk menuju masyarakat wonogiri yang berkualitas.

Pembangunan selama ini telah diposisikan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital*) dan obyek (*human resources*) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (*life cycle approach*).

Fokus pembangunan Sumber Daya Manusia untuk menuju masyarakat Wonogiri yang berkualitas, maka sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri yaitu meningkatkan kualitas keluarga dan penanggulangan kemiskinan terutama penekanan pertambahan jumlah kelahiran, termasuk juga penyediaan pelayanan KB, peningkatan ketahanan keluarga, perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta pemberdayaan perempuan terutama pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah dalam rangka mencapai visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu:

“MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS”

Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia Visi BKKBN adalah dengan menjadi **“Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”**, dan Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak”**.

Hal ini sejalan dengan Visi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 yaitu **“Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Keluarga Kecil menuju masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari”** dan Visi BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 **“Menjadi Lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian Kesenjangan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Kecil Sejahtera”**.

Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021) sebagaimana tersebut diatas.

Untuk mendukung Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri tersebut, BKBKSPP Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan jumlah penduduk yang masih sangat besar dan jumlah lahan tidak bertambah luas disamping juga masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini, maka Visi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri yang merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA, KESAMARATAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

Makna dari terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, merupakan perwujudan dari suatu keluarga kecil terdiri dari Ibu, Bapak dan 2 (dua) Anak Cukup, yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Sedangkan makna dari terwujudnya Kesenjangan Gender adalah terwujudnya Kesenjangan Gender dimana kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam

menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Terwujudnya Perlindungan Anak, yaitu suatu kondisi yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh BKBKSPP Kabupaten Wonogiri sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang ada, maka untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2016-2021, ditetapkan Misi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri, yaitu:

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKBKSPP Kabupaten Wonogiri beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Target Kinerja Sasaran per tahun					
										2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;	Pengendalian penduduk	1. Meningkatnya pengendalian laju penduduk	1.Rata-rata laju pertumbuhan sebesar -1,50%	-1,57%	-1,50%	1.Peningkatan pelayanan program KKB PK lini lapangan	1. Memperkuat Koordinasi dan Komitmen dengan Mitra Kerja	1. Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Baru sebesar 40%	-1,56%	-1,55%	-1,54%	-1,53%	-1,51%	-1,50%
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;	Peningkatan Kualitas Keluarga	2. Meningkatnya peserta KB aktif MKJP	2.Cakupan KB aktif sebesar 79,70%	79,38	79,70	2. Peningkatan Kualitas SDM tenaga penyuluh lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD	2. Meningkatkan Anggota Kelompok Kegiatan yang ber KB MKJP	2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rasio Akseptor KB sebesar 820	79,50	79,55	79,60	79,60	79,65	79,70
			3. Unmetneed sebesar 8,50%	9,83%	8,50%			3. Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Peserta KB Aktif sebesar 82,00%	9,50%	9,50%	9%	9%	8,50%	8,50%
			4. DO KB sebesar 11%	22,42%	11%			4. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 73,15%	14%	13%	13%	12%	12%	11%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Target Kinerja Sasaran per tahun					
										2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 82,75%						
								5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat	Prosentase Perempuan yang mengikuti papsemear sebesar 30%						
								6. Program pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun						
								7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase Pengguna Narkoba yang ditangani sebesar 70%						
								8. Program pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang Anak	Cakupan balita yang mempunyai kartu kembang anak sebesar 90%						

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Target Kinerja Sasaran per tahun					
										2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								9. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Rasio Jumlah Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga sebesar 85%						
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak	3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	5. Rasio KDRT sebesar 0,000001	0,00008	0,000001	3. Peningkatan Kualitas Sumber daya Perempuan	3. Memberikan Pembinaan, pelatihan dan ketrampilan perempuan	10. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase KDRT yang tertangani sampai tuntas sebesar 95%	0,000015	0,000012	0,000009	0,000006	0,000003	0,000001
			6. Rasio partisipasi perempuan sebesar 45,05%	44,57%	45,05%	4. Peningkatan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	4. Mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan	11. Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 45,74%	44,60%	44,70%	44,80%	44,90%	45,00%	45,05%
									Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 67,00%						
									Persentase partisipasi perempuan di lembaga parlemen sebesar 17,78%						

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Target Kinerja Sasaran per tahun					
										2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4. Meningkatnya kualitas hidup anak	7. Rasio Kekerasan Anak yang tidak tertangani sebesar 8,69%	10,53%	8,69%	5. Peningkatan kualitas hidup anak melalui partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak	5. Mempercepat perwujudan kabupaten layak anak.	12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan sebesar 95%	10,00%	9,52%	9,30%	9,09%	8,88%	8,69%
							6. Implementasi Perda No 1/2013 tentang Perlindungan Tindak kekerasan berbasis Gender dan Anak di setiap SKPD	13. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 95%						
			8. Rasio partisipasi anak sebesar 0,89%	0,71%	0,89%	6. Penguatan kelembagaan anak	7. Memberikan pelatihan dan mendorong partisipasi anak dalam pembangunan, mulai dari proses sampai dengan evaluasi hasil pembangunan.		Rasio program dan kegiatan responsif gender di SKPD Kab. Wonogiri sebesar 95%	0,74%	0,77%	0,80%	0,83%	0,86%	0,89%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh BKBKSP Kabupaten Wonogiri untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rumusan Pernyataan Strategi dan Kebijakan SKPD dalam Lima Tahun Mendatang

Visi : "Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia, Sejahtera, Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak".			
Misi :			
1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.1. Pengendalian penduduk	1.1.1. Meningkatnya pengendalian laju penduduk	1.1.1.1. Peningkatan pelayanan program KKB PK lini lapangan	1.1.1.1.1. Memperkuat Koordinasi dan Komitmen dengan Mitra Kerja
Misi :			
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2.1. Peningkatan Kualitas Keluarga	2.1.1. Meningkatnya peserta KB aktif MKJP	2.1.1.1. Peningkatan Kualitas SDM tenaga penyuluh lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD	2.1.1.1.1. Meningkatkan Anggota Kelompok Kegiatan yang ber KB MKJP
Misi :			
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3.1. Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak	3.1.1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	3.1.1.1.. Peningkatan Kualitas Sumber daya Perempuan	3.1.1.1.1.. Memberikan Pembinaan, pelatihan dan ketrampilan perempuan
	3.1.2. Meningkatnya kualitas hidup anak	3.1.1.2. Peningkatan kualitas hidup anak melalui partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak	3.1.1.1.2. Mempercepat perwujudan kabupaten layak anak.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Wonogiri di atas, maka dalam tahun 2016-2021 BKBKSPP Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan 4 (empat) Program pada urusan wajib non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 9 (sembilan) Program pada urusan wajib non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1 . Selanjutnya untuk Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci sebagaimana pada lampiran Renstra BKBKSPP Kabupaten Wonogiri.

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program	Indikator Program	Capaian Kinerja Kondisi Awal	Target Kinerja per tahun											
			2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
9	10		11		12		13		14		15		16	
1. Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Baru sebesar 40%	15,00%	19,00%	1.533.104.000	23,00%	597.440.000	28,00%	660.764.000	32,00%	788.620.800	36,00%	985.776.000	40,00%	1.281.509.300
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rasio Akseptor KB sebesar 820	793,8	790,00	70.220.000	800,00	70.220.000	800,00	70.220.000	810,00	70.220.000	810,00	70.220.000	820,00	70.220.000
3. Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Peserta KB Aktif sebesar 82,00%	79,38%	79,00%	62.475.000	80,00%	90.660.000	80,00%	94.564.000	81,00%	103.681.000	81,00%	129.602.000	82,00%	168.484.000
4. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 73,15%	88,24%	71,60%	1.564.975.000	71,80%	2.603.758.000	72,00%	4.674.825.700	72,80%	7.743.930.640	72,90%	8.496.883.050	73,15%	10.147.058.165
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 82,75%	81,89%	81,80%		81,90%		81,95%		82,01%		82,50%		82,75%	
5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat	Prosentase Perempuan yang mengikuti papsemear sebesar 30%	12%	15%	14.717.000	18%	14.717.000	21%	14.717.000	24%	14.717.000	27%	14.717.000	30%	14.717.000

6. Program pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	28	28	52.000.000	28	69.500.000	28	76.450.000	27	91.740.000	27	337.425.000	27	149.077.500
7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase Pengguna Narkoba yang ditangani sebesar 70%	60%	60%	14.630.000	62%	14.630.000	64%	14.630.000	66%	14.630.000	68%	14.630.000	70%	14.630.000
8. Program pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang Anak	Cakupan balita yang mempunyai kartu kembang anak sebesar 90%	85%	85%	15.000.000	86%	14.717.000	87%	16.189.000	88%	19.427.000	89%	24.284.000	90%	31.570.000
9. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Rasio Jumlah Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga sebesar 85%	56%	61%	6.200.000	66%	85.270.000	70%	93.797.000	75%	112.557.000	80%	140.697.000	85%	182.906.500
10. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase KDRT yang tertangani sampai tuntas sebesar 95%	90%	92%	18.955.000	92%	20.915.000	93%	23.007.000	94%	27.609.000	94%	34.512.000	95%	44.866.000
11. Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 45,74%	45,74%	45,74%	62.324.000	45,74%	123.140.000	45,74%	123.140.000	45,74%	162.545.000	45,74%	203.182.000	45,74%	264.138.000

	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 67,00%	57,00%	58%		60%		64%		65%		66%		67,00%	
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga parlemen sebesar 17,78%	8,88%	9,20%		10,60%		13,20%		14,40%		16,60%		17,78%	
12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan sebesar 95%	90%	90,00%	31.970.000	92,00%	99.635.000	93,00%	109.523.000	94,00%	131.519.000	94,00%	164.399.000	95,00%	213.719.000
13. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 95%	90%	91%	500.672.000	92%	587.023.000	93%	646.194.200	93%	775.234.700	94%	968.344.400	95%	1.255.975.450
	Rasio program dan kegiatan responsif gender di SKPD Kab. Wonogiri sebesar 95%	0%	40,00%		65,00%		85,00%		85,00%		90,00%		95,00%	
	J U M L A H			3.947.242.000		4.391.625.000		6.618.020.900		10.056.431.140		11.584.671.450		13.838.870.915

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja BKBKSPP Kabupaten Wonogiri untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Prestasi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja BKBKSPP Kabupaten Wonogiri kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri tahun 2016 - 2021.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan

sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja BKBKSPP Kabupaten Wonogiri yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2016 – 2021 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Sasaran/Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran per tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Penjelasan Target Kinerja
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1.Rata-rata laju pertumbuhan sebesar -1,50%	-1,57%	-1,56%	-1,55%	-1,54%	-1,53%	-1,51%	-1,50%	-1,50%	Jmlh Penddk saat ini – Jmlh Penddk sebelumnya x100% Jumlah Penduduk saat ini
2.Cakupan KB aktif sebesar 79,70%	79,38	79,50	79,55	79,60	79,60	79,65	79,70	79,70	Jmlh Peserta KB Aktif x100% Jumlah Pasangan Usia Subur
3. Unmetneed sebesar 8,50%	9,83%	9,50%	9,50%	9%	9%	8,50%	8,50%	8,50%	Jmlh PUS IAT + TIAL x100% Jumlah Pasangan Usia Subur
4. DO KB sebesar 11%	22,42%	14%	13%	13%	12%	12%	11%	11%	Jmlh PA Des th sebelumnya+PB s/d sekarang=PA seharusnya-PA sekarang = DO Fisik x100% Jumlah PA Des th sebelumnya
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
5. Rasio KDRT sebesar 0,000001	0,00008	0,000015	0,000012	0,000009	0,000006	0,000003	0,000001	0,000001	Jmlh KDRT x 100% Jumlah Kepala Keluarga (Rumah Tangga)
6. Rasio partisipasi perempuan sebesar 45,05%	44,57%	44,60%	44,70%	44,80%	44,90%	45,00%	45,05%	45,05%	Jmlh Perempuan di Parlemen + di Pemerintah + di Swasta x 100% Jumlah Penduduk Perempuan
7. Rasio Kekerasan Anak yang tidak tertangani sebesar 8,69%	10,53%	10,00%	9,52%	9,30%	9,09%	8,88%	8,69%	8,69%	Jmlh Anak Korban Kekerasan yg tdk tertangani x 100% Jumlah Kekerasan Anak

8. Rasio partisipasi anak sebesar 0,89%	0,71%	0,74%	0,77%	0,80%	0,83%	0,86%	0,89%	0,89%	Jmlh Anak yg ikut musrebang+ Jmlh Anak yg mjd konselor sebaya + Jmlh Anak yg aktif di PIK KRR + Jmlh Anak yg aktif di Forum Anak x 100% Jumlah Anak
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BKBKSPP Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 merupakan arahan penyelenggaraan urusan wajib non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan wajib non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat yang menjadi Mitra Kerja agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan kedua urusan wajib non Pelayanan Dasar tersebut perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu mencapai visi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri : “TERWUJUDNYA KELUARGA KECIL BAHAGIA, SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK” menuju masyarakat Wonogiri yang berkualitas yang dimulai dari Keluarga yang Berkualitas.

Pelaksanaan Renstra BKBKSPP Kabupaten Wonogiri 2016-2021 ini secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan maupun pemangku kebijakan, perlu dilibatkan dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonogiri yang beriman, berbudaya dan memiliki daya saing yang tinggi guna menyongsong peradapan baru. sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri : “MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS” yang tertuang dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap perencanaan tahunan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Wonogiri, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita semua, aamiin.

Wonogiri, September 2016

KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA
KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN WONOGIRI

RENI RATNASARI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631220 199010 2 002